

Bela Negara Bukan Soal Militer

YOGYAKARTA - Bela negara bukan hanya berarti harus menjadi seorang pejuang militer untuk mempertahankan negeri dari serangan asing.

Pasalnya, saat ini banyak praktik imperialisme yang tidak menggunakan metode militer melainkan melalui cara-cara modern yang tidak kasat mata.

"Imperialisme merupakan politik untuk menguasai wilayah lain demi kepentingan pihak yang menguasai. Dengan kata lain, penjajahan modern dilakukan melalui skenario perang modern," ungkap Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, M Afnan Hadikusumo, dalam seminar Bela Negara dalam Perspektif Pertanian di Ruang Amphi Teater di gedung F UMY, kemarin.

Perang modern, menurutnya, tidak menggunakan *hard power* tetapi menggunakan *soft power* bahkan *smart power*. Negara-negara yang kaya SDA menjadi sasaran perang modern.

Perang modern mirip dengan pernyataan Jean Tirole, professor ekonomi Universitas Toulouse, sebagai *proxy war* atau asymmetric warfare yakni suatu bentuk perang yang memperebutkan pengaruh ekonomi dan politik di suatu negara tanpa keterlibatan langsung negara yang melakukan agresi.

Fakta nyata dari perang modern diawali ditemukannya banyak sekali UU bercorak neoliberal yang membangun kerangka legal sistem neoliberal.

Setelah itu diikuti dengan implementasi UU yang sudah berbau neoliberal untuk menguasai perekonomian.

Ia menambahkan berubahnya undang-undang bercorak neoliberal itu menjadikan bidang perminyakan di Indonesia dikuasai asing. Data pada 2011 menyebutkan Chevron milik Amerika Serikat menguasai 44% sedangkan Pertamina dan mitra yang dianggap mencerminkan penguasaan nasional hanya menguasai 16%.

Dunia Perbankan

Penguasaan pasar dalam negeri oleh asing mengindikasikan adanya perang proxy.

Selain itu pada sektor perbankan, saham terbesar dari beberapa bank di Indonesia masih dimiliki asing.

Afnan memberikan contoh Bank UOBI 100% dimiliki oleh asing, CIMB Niaga 60,38% dikuasai asing bahkan Bank Tabungan Pegawai Nasional (BTPN) 71,6%-nya dikuasai asing.

"Dampaknya adalah kalau pihak asing mengambil semua dana yang mereka tanamkan pada perbankan di Indonesia, akan berakibat pada kolapsnya Indonesia," tandasnya.

Pada sektor pertanian juga hampir terjadi hal yang sama. Ia menyebutkan menurut data 2012-2012, Indonesia masih mengimpor beberapa produk mentah dari luar negeri.

Produk yang diimpor antara lain 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1,5 juta ton garam, bahkan 2 juta ton beras. Indonesia kaya namun SDA dimanfaatkan oleh asing dan masyarakat Indonesia dipaksa untuk membeli produk asing hasil pengolahan SDA milik Indonesia sendiri.

Penguasaan sumber daya pangan oleh pihak asing menimbulkan bahaya tersendiri bagi eksistensi suatu negara, sebab pihak asing dapat memainkan skenarionya dan masyarakat Indonesia hanya akan mengikuti kemauan pihak asing tanpa mengelak.

"Jadi, bela negara itu juga bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi hasil pertanian di Indonesia, supaya dapat bersaing dengan produk lain dan bukan hanya produk asing saja yang mendominasi pasar kita," tegas Afnan. (D19-52)